

TEORI ABDUL KARIM SOROUSH: ANALISIS TEORI AGAMA DAN MASYARAKAT BERAGAMA

Ilham Masykuri Hamdie

UIN Antasari Banjarmasin

mh@gmail.com

M. Miftah Arief

IAI Darussalam Martapura

miftaharief@iai-darussalam.ac.id

Abstract

Soroush is a Muslim and comes from a society where political discourse and political debate are still struggling to resolve religious relations with politics and therefore the types of arguments and concerns he gives to secular liberal democracy mainly come from that background. Moreover, the implication of Soroush's political theory is that God was ruled out, not because of social evolution and the ability of human beings to manage their lives based on his own knowledge and collective rational consensus, but by deliberate political decisions to expel him from sociopolitical life.

Key Words : *Abdul Karim Soroush, Religion Theory, Religious Society*

Abstrak

Soroush adalah seorang Muslim dan berasal dari masyarakat di mana wacana politik dan debat politik masih berjuang untuk menyelesaikan hubungan agama dengan politik dan oleh karena itu jenis argumen dan kekhawatiran yang ia berikan kepada demokrasi liberal sekuler terutama berasal dari latar belakang itu. Selain itu, implikasi dari teori politik Soroush adalah bahwa Tuhan dikesampingkan, bukan karena evolusi sosial dan kemampuan manusia untuk mengelola kehidupan mereka berdasarkan pengetahuannya sendiri dan konsensus rasional kolektif, tetapi oleh keputusan politik yang disengaja untuk mengusirnya dari kehidupan sosiopolitik.

Kata Kunci : Abdul Karim Soroush, Teori Agama, Masyarakat Beragama.

PENDAHULUAN

Teori Soroush tentang pemerintahan agama demokratis adalah upaya asli namun nostalgia oleh seorang teolog modern, yang tidak dapat mengatasi, di satu sisi, dengan dunia modern, sekuler, dan (terutama) liberal, dan upaya untuk menemukan ruang bagi agama dan mengeluarkan peringatan tentang posisi yang tidak berkelanjutan dari wacana Islam tradisional untuk tidak mengikuti perkembangan demokrasi modern. Dia bernostalgia tentang waktu ketika Tuhan penting dan memiliki peran dalam kehidupan sosiopolitik manusia.¹ Kehadirannya terasa dan orang-orang akan mencari persetujuan atau ketidaksetujuannya dalam mengelola kehidupan mereka, termasuk urusan politik mereka. Hal ini sama seperti mereka mencari dukungan untuk benar dan salah dan ilmiah atau tidak ilmiah. Dia hadir dan hidup dan berinteraksi dengan manusia dalam urusan sehari-hari mereka. Manusia tidak dapat menangani berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan dan alam mereka tanpa dukungan Tuhan.² Namun, ilmu pengetahuan modern dan kemanusiaan modern, atau lebih tepatnya modernitas, mengganggu keharmonisan antara Tuhan dan umat manusia ini dan mengungkapkan bahwa manusia dapat menangani urusan mereka dan mengelola hidup

¹ Adi Bunardi, "PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK ABDOLKARIM SOROUSH," *Kanz Philosophia A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 7, no. 1 (December 25, 2021): 87–110, <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v7i1.134>.

² Imron Mustofa, "'Evolusi-Devolusi' Pemerintahan Demokratis Dalam Nalar Filosofis Abdolkarim Soroush," *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 19, no. 2 (October 5, 2021), <https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.6732>.

mereka sendiri dan bahwa hidup di bawah mata atau mata Tuhan yang dirasakan agak merupakan penghalang bagi kemandirian manusia dan pembatasan potensi mereka.

Terlepas dari kenyataan bahwa Soroush bertindak seperti seorang sarjana Muslim modern dan seluruh usahanya untuk mendamaikan Islam dengan demokrasi. Demokrasi dianggap sebagai hasil dari urgensi yang dia rasakan untuk menjaga beberapa nilai-nilai agama dan tradisional tetap hidup dan memulai cara modernitas dan modernisasi yang berbeda yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual yang dia yakini,³ dia menemukan ini tidak dapat dicapai dan terus-menerus bergerak dari satu ekstrem ke ekstrem lainnya. Melainkan hal ini akan membuat keadaan menjadi bingung dan meninggalkan pembacanya di antah berantah. Salah satu tanggung jawab yang sulit dari pemerintahan agama demokratis seperti yang telah disebutkan di atas adalah untuk membuat orang puas sejauh yang dapat disetujui oleh Tuhan. Bahasa dan gagasan dalam teori ini sangat sederhana dan naif sehingga tidak dapat beresonansi untuk khalayak modern dan mentalitas didasarkan pada tradisi politik otokratis dalam sejarah Islam yang memperlakukan orang sebagai objek yang akan dibentuk dalam model dan dipandu dengan cara yang diinginkan negara.

Terlepas dari kenyataan bahwa Soroush ditarik ke arah arus utama Islamis konservatif, perhatian utamanya adalah untuk menemukan keseimbangan antara peran agama dan hak-hak manusia dalam politik. Dalam artikel di mana ia awalnya memperkenalkan teorinya tentang pemerintahan agama yang demokratis, ia sangat religius dan aspek demokrasi adalah komponen sekunder dari pemerintahan agama demokratisnya. Namun, dalam karir intelektual berikutnya, Soroush menjadi lebih liberal dan religiusitas menjadi elemen yang kurang penting atau bahkan tidak menjadi faktor sama sekali dalam pemerintahan agama demokratisnya. Misalnya, dalam artikel di mana teori pemerintah agama demokratis diperkenalkan, ia lebih ideologis dan percaya bahwa rezim agama demokratis harus "menetapkan agama sebagai panduan dan arbiter masalah dan konflik mereka", sementara kemudian, pada banyak kesempatan, ia mengatakan bahwa alasan independen harus menjadi arbiter.⁴ Ini menunjukkan beberapa bentuk evolusi dalam teori Soroush tentang pemerintahan agama yang demokratis, meskipun untuk kepentingan demokrasi daripada agama, dan kadang-kadang tidak ada jejak agama yang dapat ditemukan dalam karya-karyanya selanjutnya tentang pemerintahan agama yang demokratis. Namun, meskipun mendorong batas-batas sampai batasnya, Soroush tidak mematahkan perisai religiusitas dan gagal menghasilkan teori kohesif untuk menggabungkan Islam dengan demokrasi; pada saat-saat ketika ia menjelaskan aspek-aspek demokrasi dari teorinya, ia menggambarkan sistem politik yang tidak kurang dari demokrasi liberal sekuler, dan ketika ia menerangi kekhususan agama dari pemerintahan agama demokratisnya, Dia menyajikan sistem yang tidak lebih dari pemerintahan agama berdasarkan hukum Syariah.

PEMBAHASAN

Teori Agama

Perdebatan teologis tidak pernah kaya dan serius, setidaknya dalam masyarakat Iran untuk mengetahui bahwa Soroush telah dirintis dalam beberapa dekade terakhir, terutama setelah publikasi *The Theory of Evolution of Religious Knowledge or Text in Context*. Inti dari teori ini adalah bahwa semua yang kita miliki atas nama agama adalah interpretasi kita tentang agama dan interpretasi kita tentang agama merupakan pengetahuan agama. Pengetahuan agama terpisah dari agama itu sendiri dan itu adalah pengetahuan agama yang

³ Badarussyamsi Badarussyamsi, "Pemikiran Abdulkarim Soroush Tentang Persoalan Otoritas Kebenaran Agama," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (August 29, 2016): 56, <https://doi.org/10.15642/islamica.2015.10.1.56-81>.

⁴ Cahya Edi Setyawan, "Kritik Abdul Karim Soroush Atas Sistem Al-Faqih: Teks Agama, Interpretasi Dan Demokrasi," *FIKRAH* 5, no. 1 (June 22, 2017): 151, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v5i1.2258>.

berkembang seperti pengetahuan manusia lainnya. Teori ini telah menembus lembaga-lembaga ulama serta intelektual agama dan telah menjadi wacana dominan di Iran pada perdebatan teologis dan politik agama. Wacana agama sebelum revolusi dan sebelum Soroush mulai berhubungan dengan perdebatan dibagi menjadi dua interpretasi klasik dan saingan Islam, wacana ulama dan interpretasi intelektual agama', yang meniadakan lain dan bersaing untuk menggambarkan korpus-korpus agama yang ada dalam bentuk dan format untuk menjadi menarik bagi khalayak mereka.

Inovasi Soroush dalam perdebatan telah epistemologis dan telah menyentuh keaslian dan keberlanjutan argumen agama dalam menghadapi rasionalisme modern dan telah menantang akun agama tradisional yang diindoktrinasi dalam idealisme agama, baik dalam bentuk isolasionisme klerikal atau populisme intelektual. Soroush menikmati keuntungan dari warisan revolusi Iran yang membawa Islam ke dalam domain publik sebagai subjek perdebatan dan dia telah menyoroti peristiwa bersejarah ini dan mengubahnya menjadi kejadian epistemologis yang lebih dalam. Dia telah menjadi kekuatan untuk sekularisasi di Iran karena dia mengambil keuntungan dari warisan revolusi Islam dan, oleh karena itu, akun agama dan religiusitasnya telah menjadi berorientasi politik. Dia adalah seorang teolog dan dipandang sebagai teolog di antara komunitas agama, yang diharapkan dan mengklaim untuk menawarkan interpretasi Islam yang lebih baik dan benar.⁵ Namun, Soroush menafsirkan dan mengeksplorasi agama sebagai filsuf sekuler, sebuah pendekatan yang mengganggu kesucian dan aspek absolut agama untuk agama.⁶ Terlepas dari kenyataan bahwa ia prihatin tentang keberadaan agama dalam masyarakat, ia adalah salah satu ulama terkemuka menempatkan agama diadili untuk menyesuaikannya dengan tuntutan politik tumbuh Muslim sekuler, meskipun ia melakukan itu untuk menemukan peran untuk agama dalam kehidupan saat ini.

Teori Soroush tentang mempertimbangkan agama sebagai interpretasi agama dan memisahkan agama dari interpretasi telah merasa bebas untuk memiliki interpretasi agama yang tak ada habisnya. Melalui teori ini maka perasaan untuk menimbulkan pertanyaan tentang niatnya untuk menyelamatkan agama dan menyoroti keyakinannya bahwa seseorang harus terlebih dahulu menghilangkan rintangan teoritis. Memisahkan agama dari pengetahuan agama dan menempatkan pengetahuan agama ke tingkat pengetahuan manusia lainnya telah meliputi dua tujuan yaitu tujuan yang disengaja dan yang tidak disengaja.

Salah satu ide instrumental lain yang diterapkan Soroush dalam teori agamanya untuk akhirnya melayani teori politiknya, adalah bahwa agama itu diam, seperti objek, dan kitalah yang membuatnya berbicara dan mengeksploitasinya untuk "keluar dari sumur".⁷ Inisiatif ini ada di tangan manusia dan, tergantung pada harapan kita, agama dapat ditafsirkan dan menjadi vokal dan relevan. Agama bukanlah seperangkat keyakinan dan tugas yang diperkenalkan oleh Tuhan kepada Nabi dan para pengikutnya untuk diikuti. Terserah umat Islam untuk memilih dan mengambil keuntungan dari agama, sesuai dengan harapan mereka. Interpretasi agama ini dapat memberikan ruang yang cukup untuk memperkenalkan demokrasi sekuler dan menyebutnya demokrasi Islam. Tetapi pemahaman tentang agama ini, di satu sisi, tidak mencerminkan pemahaman umum tentang agama oleh umat Islam sebagai seperangkat bimbingan ilahi yang wajib diikuti oleh umat Islam, dan di sisi lain, ia menetapkan kebutuhan dan harapan manusia sebagai kekuatan pendorong dan dasar interaksi

⁵ Mohamad Hudaeri, "Sekularisme Dan Deprivatisasi Agama Di Era Kontemporer," *Aqlania* 9, no. 1 (June 23, 2018): 1, <https://doi.org/10.32678/aqlania.v9i01.2060>.

⁶ M. Nur Fauzi, "Mengurai Paradigma Pemikiran Gerakan Islamisme Dan Pos-Islamisme Di Era Kontemporer," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (January 28, 2021): 181–204, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i1.1396>.

⁷ Mabroer Inwan, "Rekonstruksi Khilafah Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Al-Fanar* 1, no. 1 (August 31, 2018): 91–106, <https://doi.org/10.33511/alfanar.v1n1.91-106>.

dengan agama.⁸ Oleh karena itu, agamalah yang harus mengikuti jejak manusia dan harapan mereka yang dapat membuka gerbang untuk pembenaran sistem politik apa pun.

Soroush berpendapat bahwa umat Islam lebih unggul, dominan dan dihormati ketika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang agama mereka. Namun, agama yang sama yang memberi mereka visi dan keselamatan telah dieksploitasi untuk memvalidasi intoleransi dan permusuhan. Apa pun alasannya, pemahaman yang salah tentang Islam, kekuatan spiritual yang sangat menginspirasi yang membawa persatuan, kemakmuran, dan kesuksesan umat Islam, telah menjadi rintangan kronis dan mengekspos umat Islam terhadap dominasi Barat dan ambisi kolonial. Soroush mengutip potongan-potongan tulisan nostalgia Sayyed Jamal Al Afghani tentang periode sejarah di mana umat Islam makmur dan memiliki raja-raja yang kuat, membawa tawanan dari Barat, budak dari Ethiopia dan menghancurkan berhala dan kuil-kuil idola di India, tetapi sekarang mereka telah menyerah dan terjebak dalam kemiskinan dan kelemahan.⁹ Soroush mungkin memiliki simpati dengan posisi ideologis ini, meskipun cara dia mengejar kebangkitan zaman keemasan itu sama sekali berbeda dari gerakan revivalis arus utama. Namun, ini tidak akan dapat dicapai jika umat Islam gagal memberikan interpretasi yang bermartabat tentang agama mereka. Instrumennya untuk interpretasi agama dan transformasi yang bermartabat adalah alasan atau, lebih tepatnya hanya dengan begitu kondisi teoritis untuk sistem politik rasional yaitu demokrasi.¹⁰

Soroush mengkritik mereka, seperti Shariati, yang percaya bahwa "agama yang tidak melayani kita sebelum kematian, tidak akan melayani kita setelah kematian". Soroush terganggu dengan menggunakan Islam sebagai ideologi politik dan telah berusaha untuk mengurangi beban berat pada Islam sebagai agama. Kebencian Soroush terhadap interpretasi ideologis agama tidak terbatas pada intelektualisme Islam. Berjuang melawan ideologi Islam ulama atau lebih tepatnya yurisprudensial adalah bagian utama lain dari karir intelektualnya.¹¹ Dalam pandangannya, agama bukanlah 'supermarket' di mana segala sesuatu ditemukan; agama ada untuk kemakmuran dunia lain dan urusan duniawi harus ditangani dengan alasan. Dia melakukan segala upaya untuk melucuti agama dari peran ideologis apa pun sementara pada saat yang sama dia berbicara tentang pemerintahan agama demokratis yang membayangkan peran, dengan satu atau lain cara, untuk agama dalam kehidupan publik. Seberapa jauh alasan sebagai arbiter mengakui peran agama atau hidup berdampingan dengan agama dalam mengelola kehidupan publik perlu dieksplorasi lebih lanjut.

Kontribusi utama Soroush untuk perdebatan di dunia Islam adalah bahwa umat Islam terbelakang karena mereka telah mengabaikan peran akal dalam mengelola kehidupan mereka dan satu-satunya cara untuk makmur dan menyelamatkan peradaban Islam adalah dengan menyuntikkan alasan independen, alasan yang tidak ditentukan, bukan alasan yurisprudensial, dan alasan yang terlihat untuk memahami apa yang terjadi di masa lalu dan terbatas pada peristiwa masa lalu" ke dalam darah Islam dan Muslim.¹² Namun, Soroush mengadopsi sikap

⁸ Nurhayati Nurhayati and Kamaruddin Mustamin, "DISKURSUS PROYEK ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN ISMAIL RAJI AL-FARUQI," *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 15, no. 1 (September 16, 2019): 131–60, <https://doi.org/10.24239/rsy.v15i1.417>.

⁹ Muhammad Amin Abdullah, "The Intersubjective Type of Religiosity: Theoretical Framework and Methodological Construction for Developing Human Sciences in a Progressive Muslim Perspective," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (June 20, 2020): 63–102, <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.63-102>.

¹⁰ Egi Tanadi Taufik and Hadi Wiryan, "Otoritas Hadis Dalam Asbab Al-Nuzul Al-Jadid," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 11, no. 1 (July 30, 2020), <https://doi.org/10.24252/tahdis.v11i1.13075>.

¹¹ Rusdiana Navlia Khulaisie et al., "ACHIEVING HARMONY THROUGH PROGRESSIVE ISLAMIC DIMENSIONS IN THE THINKING OF ABDULLAH SAEED," *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies* 5, no. 1 (July 20, 2019): 1, https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v5i1.902.

¹² Ali Akbar, "Abdolkarim Soroush's Theory of Revelation: From Expansion and Contraction of Religious Knowledge to Prophetic Dreams," *Islam and Christian-Muslim Relations* 33, no. 1 (January 2, 2022): 19–42, <https://doi.org/10.1080/09596410.2021.1981632>.

yang benar-benar berlawanan pada kesempatan lain dengan mengklaim bahwa "kita tidak memiliki alasan independen dalam Islam, kita membutuhkan wahyu, karena kita tidak bisa pergi ke mana pun dengan alasan kita, dan riwayat (agama) dan akal budi seperti dua mata manusia". Terlepas dari kontradiksi dalam pemikiran Soroush, dan mengingat fakta bahwa rasionalisme dan artikulasi alasan untuk memahami Islam dan mengelola kehidupan politik Muslim adalah posisi dominan dalam karir intelektualnya,¹³ ia menghadapi tahap kedua kontradiksi dan tantangan dalam teorinya; yaitu, aspek epistemologis dari teorinya versus humanismenya.

Soroush secara epistemologis menempatkan alasan sebagai arbiter dan memberikan hak veto kepada manusia untuk secara rasional dan kritis memperoleh pengetahuan dan memperlakukan agama sebagai pengetahuan agama. Oleh karena itu, secara rasional memeriksa pengetahuan ini dalam bentuk produk sejarah dan memvalidasi mereka berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan metodologi. Pendekatan terhadap akal dan epistemologi ini tidak dianggap sebagai pendekatan antaragama atau pendekatan agama sama sekali dalam wacana Islam, karena alasan sebagai arbiter independen tidak diakui dalam Islam dan diperlakukan, seperti yang dijelaskan Soroush sendiri pada kesempatan yang berbeda, sebagai entitas mengerikan yang perlu dibatasi oleh cara lain seperti agama. Dalam korespondensi Soroush dengan Ayatollah Montazeri, salah satu ulama terkemuka di Dunia Muslim Syiah dan salah satu yang paling liberal, ia mengklarifikasi posisi akal dalam Islam yang kurang lebih sejalan dengan pemahaman dominan akal dalam Islam. Dia dengan jelas mengatakan bahwa "akal manusia tidak sempurna" dan karena tidak dapat menawarkan pemahaman yang sempurna tentang masa lalu, sekarang dan masa depan, Tuhan telah mengirim para nabi untuk menyelesaikan entitas yang tidak sempurna ini dan membimbing manusia menuju keselamatan.¹⁴ Alasan dalam Islam bukanlah arbiter atau subjek utama untuk memperoleh pengetahuan. Tidak ada ruang untuk alasan independen Soroush dalam Islam dan alasan ini sebagai arbiter adalah, pada kenyataannya, produk modernitas dan liberalisme yang telah muncul dari reruntuhan metode agama dan tradisional untuk memperoleh pengetahuan. Tampaknya Soroush bertekad untuk mengubah alasan ini menjadi Islam, atau mengislamkan alasan, atau mungkin, mengubah Islam menjadi liberalisme dan rasionalisme modern.

Namun, kontradiksi antara rasionalisme Soroush dan pemahaman arus utama tentang akal dalam Islam dapat dimengerti. Ironisnya adalah kontradiksi antara elemen inti dari teorinya sendiri. Dia, di satu sisi, percaya pada alasan independen dan mencoba merasionalisasi pemahaman agama. Dengan kata lain, dia mengharapkan subjek untuk mematuhi alasan dan organisasi rasional hidupnya, termasuk sistem politik - dan di sisi lain, dia mengharapkan subjek yang sama untuk mencari hak-haknya melalui tugasnya. Rasionalismenya memberikan langkah-langkah dasar untuk sistem politik rasional yaitu demokrasi, tetapi mengikat orang tersebut dengan tugas-tugas agamanya menyangkal kemampuannya untuk bertindak secara rasional.

Pembaca karya-karya Soroush harus ekstra fleksibel dan sabar dan melewati kontradiksi dalam catatan ilmiahnya dan menemukan ide-ide dominan dalam teori-teorinya dan argumen nyata dalam kehidupan politik dan intelektualnya yang aneh. Terlepas dari kontradiksinya, jelas bahwa Soroush sedang menuju penyediaan elemen-elemen yang dibutuhkan dari pemerintahan agama demokratisnya. Dia sangat menyadari bahwa demokrasi tidak dapat

¹³ Mohammad Usman, "Dialektika Islam Dan Ilmu Pengetahuan Studi Waḥdat Al-‘Ulūm Menurut Al-Ghazali," *FIKROH: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 13, no. 2 (July 11, 2020), <https://doi.org/10.37812/fikroh.v13i2.61>.

¹⁴ Muhammad Said, "RETHINKING ISLAMIC THEOLOGY Mengagas Teologi Sosial Dalam Konteks Pluralisme Dan Multikulturalisme (Perspektif Pemikiran Teologi Fethullah Gulen)," *Potret Pemikiran* 20, no. 1 (July 1, 2018), <https://doi.org/10.30984/pp.v20i1.748>.

didirikan tanpa beberapa bentuk rasionalisme dan keterlibatan alasan independen dan, karena akal tidak dapat menjadi agama, maka agama harus menjadi rasional.

Teori agama Soroush memerlukan beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan yang bisa menghancurkan dan berakhir dalam dekonstruksi Islam di benak mereka yang melihat Soroush sebagai tokoh penuntun.¹⁵ Mempertimbangkan agama sebagai pengetahuan agama, dan memperlakukan pengetahuan itu seperti pengetahuan ilmiah lainnya yang tidak mutlak, dan sebagai dugaan yang belum dibantah, menghancurkan kesucian agama. Pengetahuan ilahi yang telah datang dari Allah dapat menjadi inspirasi bagi umat beriman. Setiap praktik keagamaan adalah agama secara keseluruhan untuk setiap kelompok orang tertentu dan orang tidak dapat memperlakukan pemahaman khusus tentang agama sebagai pengetahuan agama yang terpisah dari agama; dengan kata lain, di mata umat beriman agama mereka bukan interpretasi agama, itu adalah seluruh agama. Oleh karena itu, menempatkan pengetahuan itu ke tingkat pengetahuan manusia yang dapat disangkal dan di bawah pengawasan akal bukanlah wilayah yang aman untuk keberadaan agama, meskipun itu pasti akan mengorbankan agama demi demokrasi. Orang-orang beriman tidak melihat adanya pemisahan antara agama dan pengetahuan agama mereka.¹⁶

Soroush memiliki hak untuk memperkenalkan interpretasinya sendiri tentang agama, meskipun Islam tidak rentan secara internal terhadap interpretasi mistik filosofis atau independen murni.¹⁷ Anda tidak perlu menyesuaikan Al-Qur'an atau Islam dengan perkembangan ilmiah manusia. Tidak ada kelompok agama, Sunni, Syiah, atau sekte lain yang menganggap keyakinan agama mereka hanya sebagian kecil, atau interpretasi Islam; mereka percaya bahwa agama mereka adalah agama yang sempurna secara keseluruhan, menginspirasi dan menawarkan kepastian kepada para pengikutnya. Agama mereka bukanlah seperangkat keyakinan yang cair seperti aliran pemikiran filosofis yang terpapar perdebatan filosofis dan akademis yang tepat waktu. Agama tidak perlu selalu benar atau salah karena bukan kekhususan dan isi agama ini yang mengilhami dan menawarkan iman kepada para pengikutnya; itu lebih tergantung pada individu apakah mereka percaya pada agama itu dan menemukannya mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Ketika mereka berjuang untuk agama mereka, misalnya, mereka tidak berjuang hanya untuk interpretasi agama; umat beriman menganggap agama mereka sebagai iman yang sempurna. Apa yang dilakukan Soroush sebenarnya adalah menempatkan agama di atas fondasi yang tidak aman dan merampas kepastiannya.

Masyarakat Beragama

Pemerintah adalah Islam atau memiliki bentuk lain, termasuk demokratis, meskipun tidak bisa Islami dan demokratis karena berbagai alasan. Pemerintahan yang demokratis, seperti yang dikatakan Soroush dengan benar, didasarkan pada prinsip-prinsip seperti hak asasi manusia, keadilan, pembatasan kekuasaan, dan alasan kolektif.¹⁸ Demokrasi adalah aturan rakyat dan didasarkan pada pilihan independen rakyat. Namun, pilihan dan kemauan ini cair dan dalam perubahan konstan dan, karena fluiditas ini, saat Anda mendaftar ke pilihan orang yang bebas dan independen, Anda berkomitmen pada stabilitas yang tidak langsung yang akan diambil alih oleh penilaian rasional individu, keinginan, minat, perasaan dan

¹⁵ Oky Bagas Prasetyo, "PENDIDIKAN ISLAM DALAM KONTEKS PLURALISME AGAMA DAN REALITA SOSIAL," *Edupedia* 4, no. 2 (January 12, 2020): 11–20, <https://doi.org/10.35316/edupedia.v4i2.662>.

¹⁶ Muhammad Hamdan Yuwafik and Abdul Muhid, "STRATEGI DAKWAH PESANTREN LUHUR AL-HUSNA DALAM MENJAGA TOLERANSI BERAGAMA DI KOTA SURABAYA," *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial* 3, no. 02 (September 15, 2020): 195–211, <https://doi.org/10.37680/muharrik.v3i02.431>.

¹⁷ Lalu Supriadi B. Mujib and Khairul Hamim, "Religious Freedom and Riddah through the Maqāsidī Interpretation of Ibn 'Āshūr," *HTS Theologiese Studies / Theological Studies* 77, no. 4 (November 12, 2021), <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6928>.

¹⁸ Muchammad Nur Huda, "Post-Islamism: The New Face of Political Islam in Indonesia," *Journal Intellectual Sufism Research (JISR)* 3, no. 2 (May 27, 2021): 46–53, <https://doi.org/10.52032/jisr.v3i2.94>.

tantangan dan masuk ke dalam proses yang akan berakhir dalam masyarakat sekuler dan liberal.

Ironisnya, Soroush tidak percaya bahwa umat Islamlah yang memilih tetapi, lebih tepatnya, masyarakat religius' dan 'masyarakat liberal' yang memilih. Masyarakat liberal, dalam pandangannya, menghadapi ujian dan pilihan yang konstan dan tak ada habisnya. Analogi yang baik dari masyarakat liberal di sini mungkin ilmu pengetahuan; dalam ilmu pengetahuan Anda menduga, dan melakukan percobaan untuk menguji dugaan Anda, dan menegakkan hasil sampai mereka ditolak melalui eksperimen yang berbeda dari waktu ke waktu. Anda tidak pernah mendapatkan jawaban mutlak di mana Anda harus berhenti. Proses yang sama terjadi dalam kehidupan sosiopolitik Anda, di mana coba-coba dan kesalahan adalah realitas kehidupan.

Hal-hal berbeda dalam 'masyarakat religius', menurut Soroush; masyarakat seperti itu telah memilih dan menguji dan menemukan jawabannya dan, oleh karena itu, ingin hidup dengannya. Kehendak bebas, dalam masyarakat seperti itu, bukanlah proses trial and error; itu lebih merupakan pilihan tunggal apokaliptik yang diadopsi masyarakat dan dengan demikian menjadi religius.¹⁹ Namun, akan ada perbedaan pilihan dalam masyarakat religius di mana orang akan bebas memilih isi religiusitas mereka.

Teori Soroush bahwa umat beriman telah melewati status pilihan dan mereka telah memilih agama dan ingin hidup di bawah bimbingannya, tidak seperti masyarakat liberal, di mana orang-orang terus-menerus dalam transformasi berusaha untuk membuat pilihan terbaik, sangat tertanam dalam budaya otokratis di Iran yang mencegah dialog konstruktif dalam masyarakat untuk menemukan pengaturan sosial terbaik. Sebaliknya Anda harus menerima pilihan yang dipilih untuk Anda oleh mereka yang berkuasa atau otoritas agama; keragaman pilihan adalah nilai liberal bukan yang Islami. Dengan demikian solusi untuk tantangan sosial dalam masyarakat Islam terutama diperkenalkan melalui keputusan daripada dialog produktif dan perdebatan di antara lembaga-lembaga masyarakat sipil serta pemerintah. Ini juga menunjukkan bagaimana Soroush, sebagai seorang intelektual religius, mengakar budaya yang tidak demokratis tertanam dalam pemikiran agama dan mencegah masyarakat memperdebatkan urusan manusia dan menemukan konsensus kolektif berdasarkan alasan kolektif.²⁰ Bagaimana masyarakat dan sistem politik bisa demokratis jika mengakui garis merah agama utama untuk kehendak bebas dan debat sosiopolitik? Jawabannya adalah bahwa itu adalah realitas masyarakat religius dan orang-orang religius telah memilih untuk mengamati garis merah itu, tidak seperti masyarakat liberal, di mana orang belajar melalui pengalaman bagaimana mengatur kehidupan mereka dan mengelola urusan politik mereka. Maka pertanyaannya harus mengapa perlu untuk mencari demokrasi Islam.

Pemerintahan Islam berdiri di ujung lain spektrum dan tidak dapat didasarkan pada prinsip-prinsip yang disebutkan di atas, karena Islam memiliki nilai-nilai sendiri untuk disuntikkan ke dalam sistem politik. Soroush menegaskan hal ini pada banyak kesempatan dan menegaskan kembali bahwa religiusitas pemerintah berarti bertindak dan berlatih atas dasar nilai-nilai agama dan hak-hak khusus yang diakui untuk orang-orang, hak-hak yang mungkin berbeda dari masyarakat lain.²¹ Terlepas dari kenyataan bahwa Soroush mencoba menjauhkan diri dari Islam yurisprudensial dan menegaskan bahwa pemerintahan agamanya

¹⁹ Wardani Wardani, Majed Fawzi Abu Ghazalah, and Mazlan Ibrahim, "MORAL IDEAL-BASED QUR'AN INTERPRETATION ACCORDING TO SHĀṬIBĪ'S CONCEPT OF MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 26, no. 2 (December 13, 2021): 185, <https://doi.org/10.32332/akademika.v26i2.3050>.

²⁰ Aulia Rahmat, "Revisiting Kahrudin Yunus On Bersamaism: A Natural Law Design For Indonesia Today," *Prophetic Law Review* 3, no. 1 (June 1, 2021), <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss1.art2>.

²¹ Halgurd A. Baram, "The Inextricability of Art, Religion and Politics in Iraq," *Journal of Intersectionality* 2, no. 2 (January 1, 2018), <https://doi.org/10.13169/jinte.2.2.0038>.

yang demokratis akan didasarkan pada iman independen umat beragama dan bukan pada Syariah, dan pembaca karya-karyanya dapat merasakan kecenderungan kuat dalam karir intelektualnya untuk melewati Syariah, ia tidak dapat menemukan jalan keluar dari dilema ini. Referensi eksplisit Soroush terhadap Syariah pada beberapa kesempatan membahayakan seluruh proyek demokrasi religiusnya. Tanpa hukum Syariah, katanya, "pembangunan pemerintahan demokratis tidak akan lengkap dan gagal". Dia terus mengatakan bahwa "Syariah dan hukum-hukumnya, tanpa diragukan lagi, akan memperkuat demokrasi agama dan jika demokrasi agama (bertentangan dengan pandangan lawan-lawannya) secara teoritis dan praktis mungkin, ini tidak dapat terjadi tanpa menghormati hukum Syariah"

Soroush menganggap demokrasi agama berdasarkan Syariah sebagai sistem berdasarkan aturan hukum dan menemukan analogi antara sistem yurisprudensial dan demokrasi. Salah satu kekhususan demokrasi adalah bahwa hal itu didasarkan pada aturan hukum, dan karena demokrasi agama dijalankan oleh aturan hukum Syariah, itu identik dengan demokrasi lainnya.²² Dia sadar bahwa hukum agama dan yurisprudensial didasarkan pada tugas daripada hak dan mereka diadopsi untuk mengatur masyarakat sesuai dengan kehendak ahli hukum yang berasal dari sumber-sumber agama suci. Aturan hukum juga ada dalam kediktatoran karena diktator tidak bertindak dalam ruang hampa dan melaksanakan kehendak mereka melalui hukum mereka. Perbedaan antara aturan hukum dalam kediktatoran dan demokrasi adalah isi hukum dan bagaimana hukum disediakan: dalam demokrasi hukum disediakan oleh rakyat atau wakil rakyat terpilih berdasarkan hak-hak individu yang sama dari warga negara, tetapi dalam kediktatoran, hukum disediakan oleh kehendak diktator dan aparat kediktatoran; tentu saja aturan hukum dalam kediktatoran. Tidak identik dengan demokrasi.

Hukum yurisprudensial yang Soroush memperlakukan pada pijakan yang sama dengan hukum di negara demokrasi, adalah, seperti Soroush sendiri percaya, disediakan untuk mendefinisikan tugas-tugas Muslim dan bukan hak-hak mereka. Muslim tidak memiliki hak untuk membuat undang-undang itu dan mengubah atau menghilangkannya; mereka, menurut Soroush, melihat tugas mereka untuk menemukan hak-hak mereka dan bukan sebaliknya. Menempatkan tugas di atas hak adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar demokrasi yang menyangkut hak-hak individu. Jelas bahwa, berdasarkan unsur-unsur mendasar dari teori dan keyakinan Soroush, proyeknya tentang pemerintahan agama demokratis tidak memiliki elemen demokrasi yang sangat mendasar, yaitu: pengakuan hak-hak bagi orang-orang, bukan tugas saja; penerapan hukum sipil yang bersumber pada konsensus kolektif rakyat daripada hukum Syariah; 'kepuasan rakyat' tanpa perlu 'persetujuan Tuhan'; dan prinsip utama demokrasi - yaitu, aturan rakyat sebagai warga negara tanpa komitmen ideologis.²³

Terlepas dari poin-poin yang saling bertentangan antara tugas-tugas agama dan hak-hak individu, dengan kata lain oposisi agama terhadap hak asasi manusia atau wacana modern tentang hak asasi manusia, kita dapat melihat banyak evolusi dalam wacana agama yang mendukung hak asasi manusia. Kita dapat melihat evolusi ini dan beralih dari prinsip-prinsip agama yang ketat ke pendekatan hak asasi manusia dalam kehidupan Soroush dan dalam pikirannya.²⁴ Soroush mengakui bahwa tidak mungkin ada demokrasi tanpa menjunjung tinggi hak-hak individu. Pertimbangan hak-hak individu ini sebagai salah satu elemen kunci demokrasi tetap terbatas pada pernyataan-pernyataan yang terisolasi oleh Soroush, dan pada

²² Tauseef Ahmad Parray, "Islam, State and Modernity: Mohammed Abed Al-Jabri and the Future of the Arab World," *American Journal of Islam and Society* 35, no. 3 (July 1, 2018): 90–92, <https://doi.org/10.35632/ajis.v35i3.487>.

²³ Hisanori Kato, "Exploring the Reality and Aspirations of Muslims," *ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture* 2, no. 1 (January 30, 2021): 1–20, <https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v2i1.102>.

²⁴ Sagnik Dutta, "Becoming Equals: The Meaning and Practice of Gender Equality in an Islamic Feminist Movement in India," *Feminist Theory*, June 18, 2021, 146470012110236, <https://doi.org/10.1177/14647001211023641>.

prinsipnya, dalam demokrasi Islamnya hak-hak individu ini harus selalu didamaikan dengan tugas-tugas Muslim.²⁵ Kedua gagasan ini memiliki sumber yang berbeda dan dua arah yang berlawanan yang praktis tidak mungkin untuk didamaikan. Soroush tidak menawarkan model praktis untuk rekonsiliasi hak-hak individu dan tugas-tugas Muslim yang diabadikan dalam Syariah. Dia hanya mengusulkan upaya teoritis untuk mendamaikan keduanya berdasarkan fakta bahwa "Muslim mencari hak-hak mereka melalui tugas mereka". Menurut Soroush, hak-hak individu yang dia khotbahkan berbeda dari cara istilah ini umumnya dipahami di dunia sekuler dan liberal.

Apapun kekhususan demokrasi agama Soroush, teori politiknya didasarkan pada gagasan bahwa memiliki demokrasi Islam atau sekuler tergantung pada masyarakat: jika masyarakat beragama, pemerintah akan ada agama juga dan jika masyarakat sekuler, pemerintah akan ada sekuler; dengan kata lain, Sistem politik adalah produk alami dari make-up masyarakat. Soroush tidak menjelaskan apa yang dia maksud dengan masyarakat religius. Jika dia berarti bahwa mayoritas masyarakat berasal dari agama tertentu, atau bahwa mayoritas orang percaya pada agama dan setia pada agama itu, maka sistem politik berdasarkan nilai-nilai dan hak-hak yang didefinisikan oleh mayoritas itu tidak akan dapat mengakomodasi hak dan nilai-nilai minoritas. Soroush mungkin benar untuk mengasumsikan bahwa jika mayoritas orang dalam masyarakat percaya pada Islam, misalnya, pemerintah Islam adalah produk alami dari masyarakat semacam itu. Namun, dia tidak bisa mengharapkan pemerintah ini menjadi demokratis karena belum terjadi dalam sejarah masyarakat Islam; Pemerintah Islam tidak demokratis selama masa Nabi Muhammad dan belum ada pemerintahan Islam yang demokratis sejak itu.

Definisi dan referensi Soroush untuk masyarakat religius atau nonreligius tampaknya sangat tidak ilmiah dan dipikirkan dengan buruk karena tiga alasan. Pertama-tama, kedengarannya seolah-olah ia menganggap masyarakat sebagai entitas yang unik dan kohesif yang dapat mengadopsi identitas eksklusif, apakah religius atau sekuler, seolah-olah tidak ada individu, kelompok, iman, dan minoritas lain dengan nilai-nilai yang berlawanan dan pertimbangan hak yang ada. Dalam sejarah pemerintahan Islam, minoritas ini telah ada tetapi tidak diakui setara dengan Muslim hanya karena pemerintah Islam didirikan atas dasar kehendak penguasa Muslim yang mengklaim memiliki legitimasi agama; dengan kata lain, pemerintah Islam adalah produk alami dari masyarakat Islam.

KESIMPULAN

Pengalaman politik umat Islam sampai akhir abad ke-20 adalah pemerintahan khalifah, raja dan negara otoriter yang mencari legitimasi mereka dari Islam. Perdebatan politik telah berpusat terutama pada bagaimana para penguasa harus memerintah; misalnya, penguasa harus adil, bijaksana dan sebagainya dan yang diperintah harus mematuhi "Tuhan, Nabi dan mereka yang mewakilinya". Tidak ada jejak gagasan tentang orang-orang, dalam pengertian modernnya, dalam literatur Islam, dan referensi untuk umat Islam telah mengatasnamakan Umat Islam yang merupakan konsep agama yang menandakan komunitas orang percaya. Negara-negara Islam yang muncul setelah disintegrasi kerajaan Islam telah dijajah oleh kekuatan Barat atau diperintah oleh rezim otoriter, raja dan dinasti etnis. Modernitas dan gerakan sosial modern belum dihasilkan di dalam masyarakat ini, dan gerakan untuk beberapa bentuk demokrasi tidak lebih tua dari seratus tahun, dan bukan sebagai gerakan sosial tetapi, lebih tepatnya, perjuangan politik sporadis di kalangan intelektual yang terinspirasi oleh peradaban Barat.

²⁵ Bryan S Turner, "Saba Mahmood: Secularization, Practice, and the 'Ethical Turn,'" *Journal of the American Academy of Religion*, November 19, 2019, <https://doi.org/10.1093/jaarel/lfz081>.

REFERENSI

- Abdullah, Muhammad Amin. "The Intersubjective Type of Religiosity: Theoretical Framework and Methodological Construction for Developing Human Sciences in a Progressive Muslim Perspective." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (June 20, 2020): 63–102. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.63-102>.
- Akbar, Ali. "Abdolkarim Soroush's Theory of Revelation: From Expansion and Contraction of Religious Knowledge to Prophetic Dreams." *Islam and Christian-Muslim Relations* 33, no. 1 (January 2, 2022): 19–42. <https://doi.org/10.1080/09596410.2021.1981632>.
- Badarussyamsi, Badarussyamsi. "Pemikiran Abdolkarim Soroush Tentang Persoalan Otoritas Kebenaran Agama." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (August 29, 2016): 56. <https://doi.org/10.15642/islamica.2015.10.1.56-81>.
- Baram, Halgurd A. "The Inextricability of Art, Religion and Politics in Iraq." *Journal of Intersectionality* 2, no. 2 (January 1, 2018). <https://doi.org/10.13169/jinte.2.2.0038>.
- Bunardi, Adi. "PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK ABDOLKARIM SOROUSH." *Kanz Philosophia A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 7, no. 1 (December 25, 2021): 87–110. <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v7i1.134>.
- Dutta, Sagnik. "Becoming Equals: The Meaning and Practice of Gender Equality in an Islamic Feminist Movement in India." *Feminist Theory*, June 18, 2021, 146470012110236. <https://doi.org/10.1177/14647001211023641>.
- Fauzi, M. Nur. "Mengurai Paradigma Pemikiran Gerakan Islamisme Dan Pos-Islamisme Di Era Kontemporer." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (January 28, 2021): 181–204. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i1.1396>.
- Huda, Muchammad Nur. "Post-Islamism: The New Face of Political Islam in Indonesia." *Journal Intellectual Sufism Research (JISR)* 3, no. 2 (May 27, 2021): 46–53. <https://doi.org/10.52032/jisr.v3i2.94>.
- Hudaeri, Mohamad. "Sekularisme Dan Deprivatisasi Agama Di Era Kontemporer." *Aqlania* 9, no. 1 (June 23, 2018): 1. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v9i01.2060>.
- Kato, Hisanori. "Exploring the Reality and Aspirations of Muslims." *ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture* 2, no. 1 (January 30, 2021): 1–20. <https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v2i1.102>.
- Khulaisie, Rusdiana Navlia, Azhar A. Hafizh, Abdul Wafi, and Sofia Sofia. "ACHIEVING HARMONY THROUGH PROGRESSIVE ISLAMIC DIMENSIONS IN THE THINKING OF ABDULLAH SAEED." *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies* 5, no. 1 (July 20, 2019): 1. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v5i1.902.
- Mabroer Inwan. "Rekonstruksi Khilafah Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Al-Fanar* 1, no. 1 (August 31, 2018): 91–106. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v1n1.91-106>.
- Mujib, Lalu Supriadi B., and Khairul Hamim. "Religious Freedom and Riddah through the Maqāṣidī Interpretation of Ibn 'Āshūr." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 77, no. 4 (November 12, 2021). <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6928>.
- Mustofa, Imron. "'Evolusi-Devolusi' Pemerintahan Demokratis Dalam Nalar Filosofis Abdolkarim Soroush." *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 19, no. 2 (October 5, 2021). <https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.6732>.
- Nurhayati, Nurhayati, and Kamaruddin Mustamin. "DISKURSUS PROYEK ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN ISMAIL RAJI AL-FARUQI." *Rausyan Fikr: Jurnal Studi*

- Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 15, no. 1 (September 16, 2019): 131–60.
<https://doi.org/10.24239/rsy.v15i1.417>.
- Okny Bagus Prasetyo. “PENDIDIKAN ISLAM DALAM KONTEKS PLURALISME AGAMA DAN REALITA SOSIAL.” *Edupedia* 4, no. 2 (January 12, 2020): 11–20.
<https://doi.org/10.35316/edupedia.v4i2.662>.
- Parray, Tauseef Ahmad. “Islam, State and Modernity: Mohammed Abed Al-Jabri and the Future of the Arab World.” *American Journal of Islam and Society* 35, no. 3 (July 1, 2018): 90–92. <https://doi.org/10.35632/ajis.v35i3.487>.
- Rahmat, Aulia. “Revisiting Kahrudin Yunus On Bersamaism: A Natural Law Design For Indonesia Today.” *Prophetic Law Review* 3, no. 1 (June 1, 2021).
<https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss1.art2>.
- Said, Muhammad. “RETHINKING ISLAMIC THEOLOGY Mengagas Teologi Sosial Dalam Konteks Pluralisme Dan Multikulturalisme (Perspektif Pemikiran Teologi Fethullah Gulen).” *Potret Pemikiran* 20, no. 1 (July 1, 2018).
<https://doi.org/10.30984/pp.v20i1.748>.
- Setyawan, Cahya Edi. “Kritik Abdul Karim Soroush Atas Sistem Al-Faqih: Teks Agama, Interpretasi Dan Demokrasi.” *FIKRAH* 5, no. 1 (June 22, 2017): 151.
<https://doi.org/10.21043/fikrah.v5i1.2258>.
- Taufik, Egi Tanadi, and Hadi Wiryawan. “Otoritas Hadis Dalam Asbab Al-Nuzul Al-Jadid.” *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 11, no. 1 (July 30, 2020).
<https://doi.org/10.24252/tahdis.v11i1.13075>.
- Turner, Bryan S. “Saba Mahmood: Secularization, Practice, and the ‘Ethical Turn.’” *Journal of the American Academy of Religion*, November 19, 2019.
<https://doi.org/10.1093/jaarel/lfz081>.
- Usman, Mohammad. “Dialektika Islam Dan Ilmu Pengetahuan Studi Waḥdat Al-‘Ulūm Menurut Al-Ghazali.” *FIKROH: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 13, no. 2 (July 11, 2020). <https://doi.org/10.37812/fikroh.v13i2.61>.
- Wardani, Wardani, Majed Fawzi Abu Ghazalah, and Mazlan Ibrahim. “MORAL IDEAL-BASED QUR’AN INTERPRETATION ACCORDING TO SHĀṬIBĪ’S CONCEPT OF MAQĀSĪD AL-SHARĪ’AH.” *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 26, no. 2 (December 13, 2021): 185. <https://doi.org/10.32332/akademika.v26i2.3050>.
- Yuwafik, Muhammad Hamdan, and Abdul Muhid. “STRATEGI DAKWAH PESANTREN LUHUR AL-HUSNA DALAM MENJAGA TOLERANSI BERAGAMA DI KOTA SURABAYA.” *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial* 3, no. 02 (September 15, 2020): 195–211. <https://doi.org/10.37680/muharrik.v3i02.431>.